

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

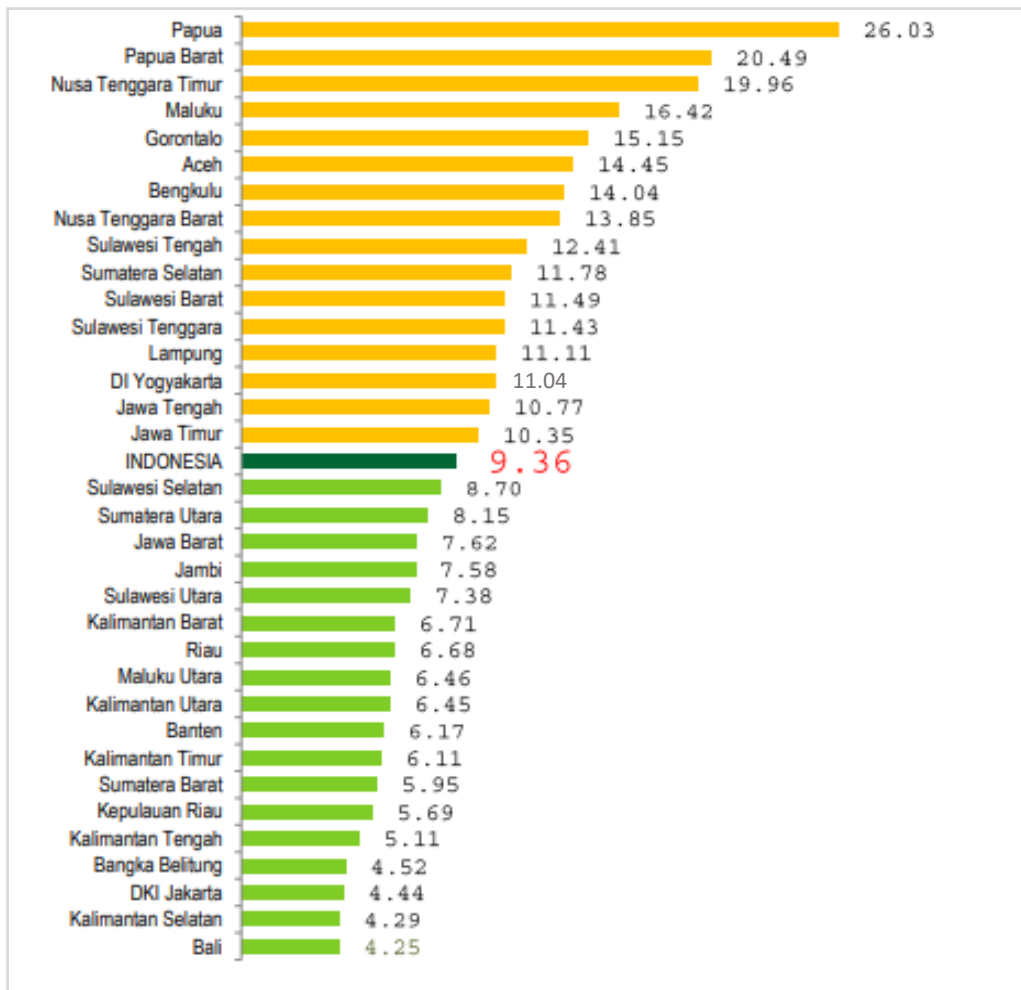
Pembangunan ekonomi merupakan aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Setiap negara memiliki strategi pembangunan ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan nasional tetapi juga mencakup transformasi struktural ekonomi dan sosial masyarakat. Proses pembangunan ekonomi melibatkan berbagai sektor seperti industri, pertanian, jasa, dan sektor lainnya yang saling terintegrasi. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pembangunan ekonomi telah menjadi fokus utama berbagai negara, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan global yang belum terselesaikan. Permasalahan kemiskinan timbul karena adanya sebagian orang yang belum mampu mengelola kehidupannya hingga mencapai taraf kehidupan yang layak (Ristika et al., 2021). Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia diharapkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam deklarasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk mencapai target universal bersama yang berfokus pada aspek pembangunan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial (Adhitya et al., 2022). Program pengentasan kemiskinan menjadi agenda prioritas dalam *Sustainable Development Goals*

(SDGs), khususnya pada tujuan pertama yaitu "*No Poverty*" yang menargetkan pengurangan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2030.

Menurut Amartya Sen dalam Todaro dan Smith (2011) kemiskinan tidak hanya tentang keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang layak. Konsep *capability* Sen, lebih menekankan pada kebebasan seseorang untuk memenuhi kehendaknya. Kapabilitas merupakan unsur penting bagi manusia karena semakin besar kapabilitas seseorang, semakin besar pula kebebasan untuk merespon peluang-peluang yang ada. Selain itu, kapabilitas juga mampu mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sen bahwa kemiskinan terjadi karena adanya keterbatasan kapabilitas.

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,36 persen atau setara dengan 25,9 juta penduduk miskin. Program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan berbagai bantuan sosial lainnya telah diimplementasikan pemerintah (Azriyansyah, 2022). Berikut ini merupakan persentase penduduk miskin menurut provinsi pada tahun 2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2023
(Persen)**

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Papua menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, mencapai 26,03%, diikuti oleh Papua Barat (20,49%), Nusa Tenggara Timur (19,96%), Maluku (16,42%), dan Gorontalo (15,15%). Kondisi ini kontras dengan 5 provinsi yang memiliki persentase kemiskinan terendah yaitu Bali (4,25%), Kalimantan Selatan (4,29%), DKI Jakarta (4,44%), Bangka Belitung (4,52%), dan Kalimantan Tengah (5,11%).

Kesenjangan signifikan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural yang memengaruhi dinamika pembangunan regional. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua, Papua Barat, dan NTT menghadapi kendala geografis berupa topografi yang bergunung-gunung dan keterpencilan wilayah yang menyulitkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan terbatasnya akses terhadap pasar, barang, dan jasa. Struktur ekonomi di wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertanian subsisten dengan produktivitas rendah, sementara diversifikasi ekonomi terhambat oleh keterbatasan investasi dan kapasitas kelembagaan.

Aspek historis juga berperan penting dalam menjelaskan ketimpangan ini. Provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya mengalami kesenjangan dalam alokasi sumber daya pembangunan selama beberapa dekade, mengakibatkan ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak pada rendahnya daya saing ekonomi lokal dan sulitnya menarik investasi untuk menggerakkan pertumbuhan.

Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah seperti Bali, DKI Jakarta, dan provinsi-provinsi di Kalimantan memiliki beberapa keunggulan komparatif. Bali memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat dan terintegrasi dengan ekonomi global, menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor pendukung seperti kuliner, kerajinan, dan *hospitality* yang menyerap banyak tenaga kerja. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menikmati konsentrasi aktivitas ekonomi

bernilai tambah tinggi, termasuk jasa keuangan, perdagangan, dan bisnis, didukung oleh infrastruktur modern dan sumber daya manusia berkualitas.

Provinsi-provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menunjukkan persentase kemiskinan yang rendah berkat pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal. Sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan menciptakan lapangan kerja dengan pendapatan relatif tinggi. Bangka Belitung dengan produksi timah dan pengembangan sektor pariwisata pesisir juga mampu mendiversifikasi basis ekonominya.

Faktor kualitas sumber daya manusia turut memperlebar kesenjangan ini. Provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan merata, dengan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Hal ini tercermin dari tingkat literasi dan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan dan produktivitas lebih baik. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi masih berjuang dengan isu *dropout*, kekurangan guru berkualitas, dan keterbatasan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Implementasi kebijakan desentralisasi juga memberikan dampak yang berbeda. Provinsi dengan kapasitas pemerintahan dan fiskal yang lebih kuat mampu memanfaatkan otonomi daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara itu, provinsi dengan kapasitas

kelembagaan yang lebih lemah menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan secara efektif.

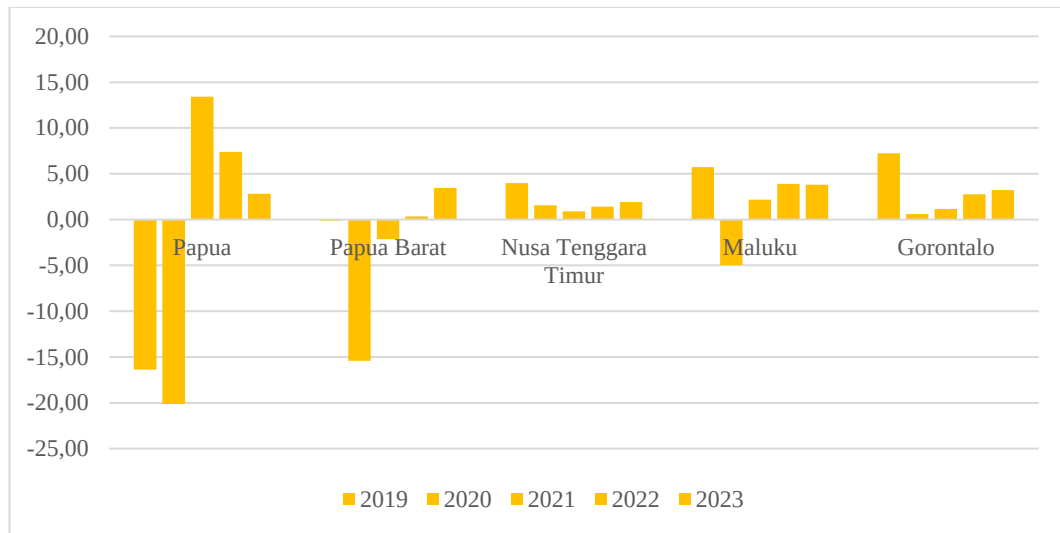
Dalam konteks pembangunan nasional, upaya mengurangi kesenjangan kemiskinan antar provinsi perlu memperhatikan karakteristik spesifik masing-masing wilayah dan mengadopsi pendekatan yang komprehensif serta berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan struktural yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tertinggal.

Menurut Kuznet dalam Tambunan (2003) Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi cenderung menaikkan tingkat kemiskinan pada tahap awal, tetapi tingkat kemiskinan terus menurun saat mendekati tahap akhir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap kemiskinan.

Menurut Siregar dan Wahyuni dalam Wani et al., (2020) Kemiskinan selalu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hal inilah yang menjadi keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan *necessary condition* bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

Perekonomian sebuah negara dianggap berkembang ketika kegiatan ekonominya saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara tahunan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara, tercermin dari laju pertumbuhan

ekonominya. Setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari perencanaan dan tujuan pembangunan daerah (Yuniarti et al., 2020). Berikut ini merupakan laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita di 5 Provinsi Termiskin Tahun 2019-2023 (Persen)

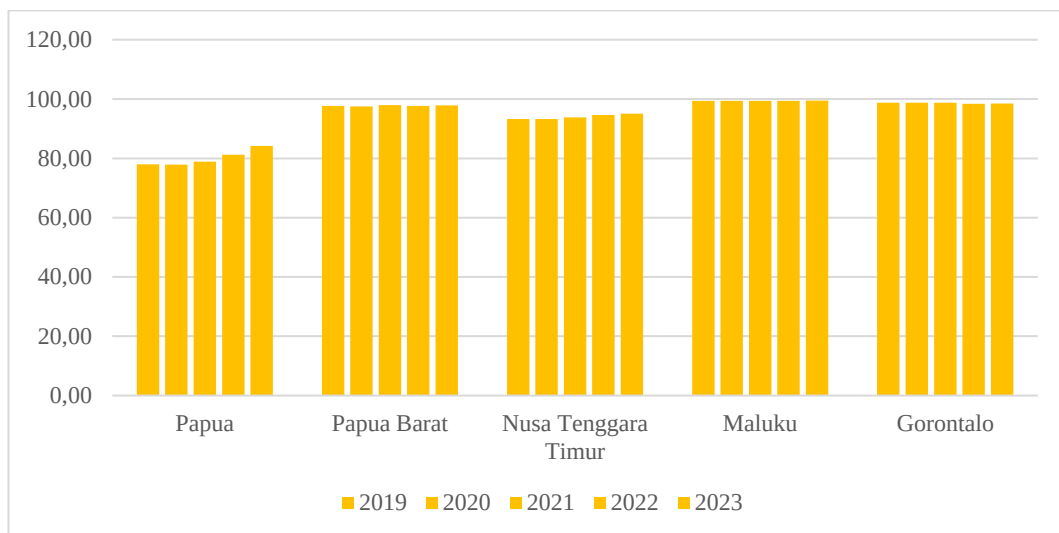
Berdasarkan gambar 1.2, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita di 5 provinsi termiskin dalam 5 tahun terakhir, mengalami fluktuasi yang mencerminkan tantangan struktural dan kondisi perekonomian lokal yang kompleks. Provinsi Papua menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat ekstrem, dengan kontraksi tajam sebesar -16,36% pada 2019 dan -20,13% pada 2020, yang kemudian melonjak tajam ke 13,43% di 2021. Fluktuasi ini erat kaitannya dengan ketergantungan Papua terhadap sektor pertambangan, khususnya tembaga dan emas, yang sangat sensitif terhadap aktivitas ekspor dan dinamika harga komoditas global.

Papua Barat juga mengalami pertumbuhan negatif selama tiga tahun berturut-turut (2019 hingga 2021), dengan titik terendah -15,42% di tahun 2020. Baru pada tahun 2023, Papua Barat mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 3,47%. Hal ini diduga berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang mulai efektif. Sementara itu, Maluku mengalami kontraksi -4,95% pada 2020, tetapi menunjukkan tren pemulihan yang stabil hingga 2023 (3,81%). Perekonomian Maluku sangat bergantung pada sektor perikanan dan industri pengolahan, yang baru pulih setelah gangguan logistik dan distribusi nasional akibat pembatasan transportasi.

NTT secara umum menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan cenderung stagnan, dengan angka terendah hanya 0,89% pada 2021 dan tertinggi 3,98% pada 2019. Pertumbuhan yang rendah ini mencerminkan lemahnya daya saing industri lokal, rendahnya investasi, dan ketergantungan terhadap pertanian subsisten yang rentan terhadap cuaca ekstrem. Gorontalo menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mengalami pertumbuhan negatif sepanjang periode ini, meskipun angkanya tetap rendah. Provinsi ini mencatat pertumbuhan cukup konsisten antara 0,60% hingga 3,23%, didukung oleh sektor pertanian dan jasa yang relatif stabil.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan jika mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan maka semakin tinggi kompetensi dan keahlian yang dimilikinya, dengan begitu semakin besar juga peluang untuk dapat masuk ke dunia kerja dan mudah menciptakan lapangan

pekerjaan (Dwi Utami & Welly Udjianto, 2023). Dalam penelitian ini, indikator pendidikan yang digunakan yaitu angka melek huruf, berikut ini merupakan angka melek huruf tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Gambar 1.3 Angka Melek Huruf di 5 Provinsi Termiskin Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3, angka melek huruf di 5 provinsi termiskin dalam 5 tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan. Provinsi Papua menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 78,00% pada 2019 menjadi 84,22% pada 2023. Meski sempat turun sedikit pada 2020 (77,90%), perbaikan terlihat jelas di tahun-tahun berikutnya, diduga sebagai hasil dari berbagai program akselerasi pendidikan dasar dan kampanye literasi di wilayah pedalaman yang mulai membuahkan hasil.

Papua Barat mengalami fluktuasi ringan dengan angka tertinggi 97,91% di 2021 dan sedikit turun ke 97,64% pada 2022 sebelum naik kembali ke 97,84% pada 2023. Meski perubahannya kecil, ini menunjukkan adanya tantangan

mempertahankan tingkat literasi di daerah-daerah terpencil yang terisolasi geografis.

Provinsi Maluku secara konsisten mencatat angka melek huruf di atas 99%, menunjukkan keberhasilan relatif dalam mempertahankan capaian literasi, meskipun sedikit variasi muncul di 2022 (99,40%) sebelum naik lagi ke 99,47% di 2023. Hal ini mencerminkan keberlanjutan program pendidikan formal di kawasan kepulauan meski menghadapi hambatan distribusi sarana belajar.

NTT memperlihatkan tren kenaikan stabil dari 93,24% pada 2019 ke 95,11% pada 2023. Meski peningkatannya tidak besar, ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap berkat upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan di kawasan pedesaan yang sebelumnya terpinggirkan.

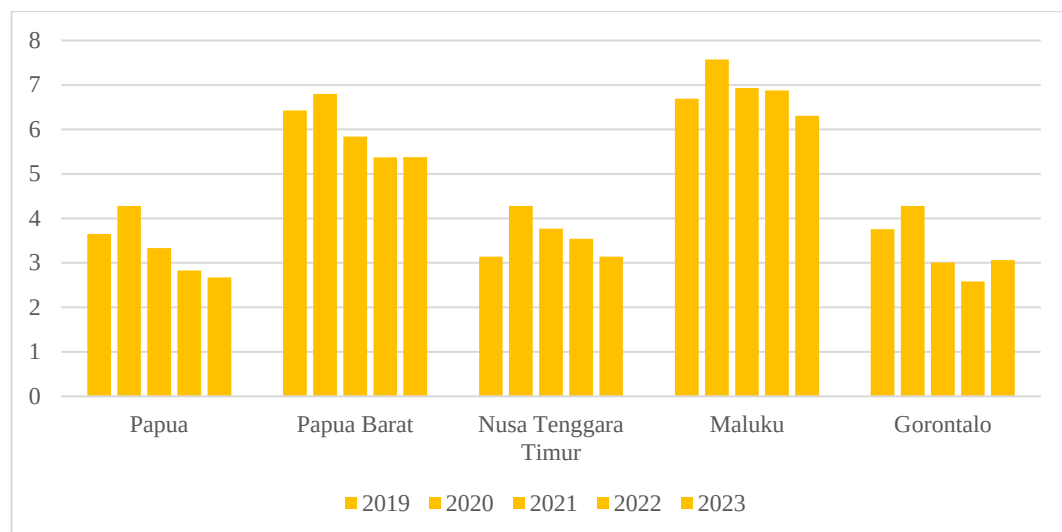
Sementara itu, Gorontalo mencatat stabilitas luar biasa, dengan angka melek huruf bertahan sekitar 98,75% selama 2019–2021, hanya turun sedikit di 2022 (98,42%) dan kembali naik ke 98,49% di 2023. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan relatif program pendidikan dan penguatan literasi yang sudah mapan.

Secara keseluruhan, meskipun tingkat awal dan tantangan setiap provinsi berbeda, data menunjukkan adanya pola perbaikan umum, terutama di Papua yang menjadi sorotan utama dalam hal lonjakan capaian literasi dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan berbasis wilayah dan intervensi spesifik yang menjawab kebutuhan unik tiap provinsi termiskin.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pengangguran dapat

menyebabkan dampak lain bagi kehidupan sosial yaitu kriminalitas dan kekerasan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang melambat serta tingkat kesejahteraan semakin menurun (Azriyansyah, 2022).

Dalam penelitian ini, indikator pengangguran yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini penting untuk mengukur tingkat pengangguran karena dapat menggambarkan secara nyata kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah dan potensi dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Berikut ini merupakan tingkat pengangguran terbuka tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di 5 Provinsi Termiskin Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4, dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir pengangguran di 5 Provinsi Termiskin berfluktuatif dikarenakan terjadinya berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks. Fluktuasi tingkat pengangguran ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh provinsi-

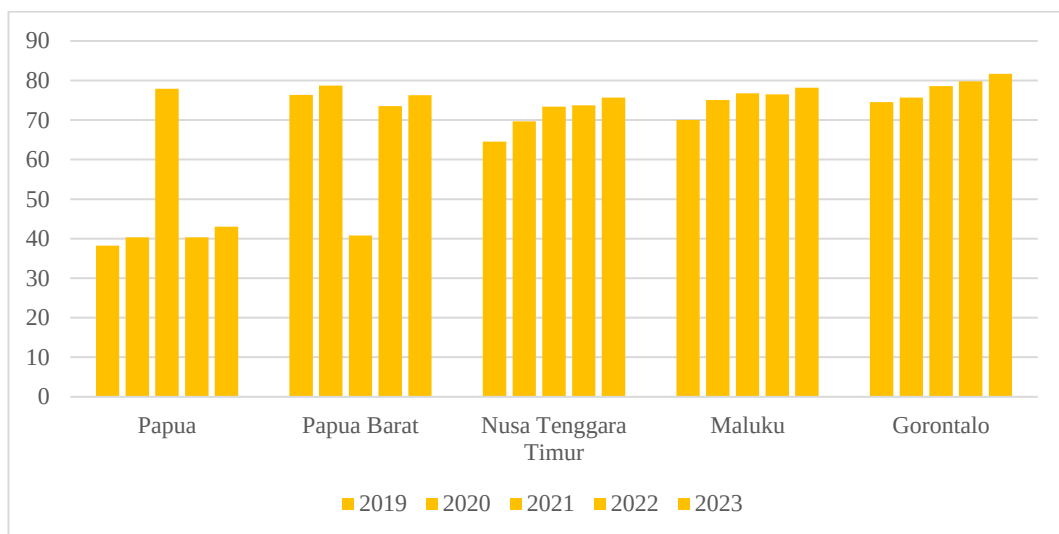
provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, dimana kondisi ekonomi yang tidak stabil berdampak langsung terhadap ketersediaan lapangan kerja.

Papua menunjukkan pola yang relatif stabil dengan tingkat pengangguran yang cenderung menurun dari 3,65% pada 2019 menjadi 2,67% pada 2023, meskipun mengalami peningkatan pada 2020 hingga 4,28%. Sementara itu, Papua Barat memperlihatkan fluktuasi yang lebih signifikan, dimana tingkat pengangguran sempat mencapai puncaknya di 6,80% pada 2020 namun kemudian stabil di sekitar 5,37-5,38% pada periode 2022-2023. Kondisi serupa terjadi di Nusa Tenggara Timur yang mengalami peningkatan pengangguran pada 2020 menjadi 4,28% sebelum kembali turun ke level 3,14% pada 2023.

Maluku menunjukkan tantangan yang paling konsisten dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, berkisar antara 6,31% hingga 7,57% sepanjang periode tersebut. Di sisi lain, Gorontalo memperlihatkan tren yang lebih positif dengan penurunan bertahap dari 3,76% pada 2019 menjadi 3,06% pada 2023, meskipun sempat mengalami peningkatan pada periode tertentu. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa selain dampak pandemi, faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kurangnya diversifikasi ekonomi lokal turut berperan dalam menciptakan ketidakstabilan pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah tersebut.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu infrastruktur ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011) infrastruktur ekonomi adalah prasarana fisik yang menyediakan layanan publik penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti listrik, telekomunikasi, penyediaan air, sanitasi, dan lain-

lain. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur infrastruktur ekonomi adalah akses sanitasi, mengingat sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Berikut ini merupakan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)

Gambar 1.5 Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak di 5 Provinsi Termiskin Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.5, dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di 5 Provinsi Termiskin menunjukkan disparitas yang sangat signifikan dan pola perkembangan yang beragam. Kondisi ini mencerminkan tantangan infrastruktur dan kesenjangan pembangunan yang masih menjadi permasalahan serius di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Papua menampilkan fluktuasi yang sangat ekstrem dalam akses sanitasi layak, dimana pada 2019-2020 akses sanitasi berada pada level rendah sekitar 38-

40%, namun mengalami lonjakan dramatis menjadi 77,89% pada 2021 sebelum kembali turun ke kisaran 40-43% pada periode 2022-2023. Fluktuasi yang tidak konsisten ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam metodologi pengumpulan data atau implementasi program sanitasi yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, Papua Barat menunjukkan konsistensi yang lebih baik dengan tingkat akses sanitasi yang relatif tinggi, berkisar antara 73,52% hingga 78,71% sepanjang periode observasi, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 40,81% pada 2021.

Nusa Tenggara Timur memperlihatkan tren positif yang konsisten dengan peningkatan bertahap akses sanitasi dari 64,55% pada 2019 menjadi 75,67% pada 2023, menunjukkan komitmen yang baik dalam pembangunan infrastruktur sanitasi. Maluku dan Gorontalo menunjukkan performa yang relatif stabil dan baik, dimana Maluku mempertahankan akses sanitasi di kisaran 70-78% dengan tren peningkatan, sementara Gorontalo mencatat pencapaian terbaik dengan akses sanitasi yang konsisten meningkat dari 74,57% pada 2019 menjadi 81,72% pada 2023. Disparitas yang tinggi antar provinsi ini menunjukkan bahwa faktor geografis, kebijakan daerah, alokasi anggaran pembangunan, serta kondisi topografi wilayah berperan penting dalam menentukan keberhasilan program penyediaan sanitasi layak bagi masyarakat.

Kemudahan akses infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, air minum, sanitasi, dan fasilitas layanan dasar lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap jalan raya, kesempatannya untuk memasuki

pasar akan lebih luas dan peluangnya untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak akan semakin besar. Begitu juga dengan akses terhadap sanitasi layak yang berpengaruh pada kondisi kesehatan dan berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia. Ketersediaan infrastruktur berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan prakondisi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur yang lambat dapat menjadi halangan bagi pembangunan dan pertumbuhan secara keseluruhan.

Interaksi antara keempat variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi, menimbulkan kompleksitas dalam dinamika kemiskinan yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat seharusnya dapat mendorong perbaikan infrastruktur ekonomi termasuk akses sanitasi, namun jika tidak diimbangi dengan pemerataan dan peningkatan pendidikan, manfaatnya mungkin tidak akan optimal dalam mengentaskan kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi, meskipun di daerah dengan PDRB yang baik, dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya pendidikan.

Kompleksitas ini juga tercermin dalam bagaimana akses sanitasi yang terbatas dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki akses sanitasi yang layak, mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan yang dapat mengurangi produktivitas kerja dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, angka

melek huruf yang rendah dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk memahami pentingnya sanitasi yang baik dan mengakses informasi tentang kesehatan, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Interaksi antar variabel ini menciptakan tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Misalnya, investasi dalam peningkatan akses sanitasi membutuhkan dukungan dana yang dapat diperoleh dari pertumbuhan PDRB, namun efektivitas penggunaan fasilitas sanitasi juga bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat yang tercermin dari angka melek huruf. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas sanitasi yang lebih baik, meskipun mereka memahami pentingnya sanitasi layak. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi terhadap kemiskinan studi kasus di lima provinsi termiskin tahun 2015-2023 menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, sebagai dasar empiris dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan khususnya di provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Nugroho (2023) mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan menurut Lavenia et al., (2023) menyatakan bahwa PDRB dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dan angka melek huruf berpengaruh negatif terhadap

kemiskinan. Kemudian menurut Fitriana & Gravitiani (2022) menyatakan bahwa akses sanitasi layak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat kesenjangan (*research gap*) yang signifikan pada hasil-hasil penelitian terdahulu. Kesenjangan tersebut teridentifikasi karena adanya perbedaan hasil penelitian dalam jurnal-jurnal sebelumnya yang meneliti topik serupa. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan, sebagian peneliti menemukan hubungan negatif antar variabel, sementara yang lain menemukan hubungan positif antar variabel. Selain itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan kombinasi variabel secara bersama-sama yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi yang belum pernah diteliti secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya. Penggunaan keempat variabel tersebut secara bersamaan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti kemiskinan di 5 provinsi termiskin. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kemiskinan di 5 provinsi termiskin tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kemiskinan nasional. Oleh karena itu, penulis menentukan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus di 5 Provinsi Termiskin Tahun 2015-2023)”** sebagai fokus penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi secara parsial terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin tahun 2015-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi secara bersama-sama terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi secara parsial terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin tahun 2015-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi secara bersama-sama terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin tahun 2015-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik itu secara teoritis maupun empiris.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca. Penelitian ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan infrastruktur ekonomi baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

b. Kegunaan Praktis

- Bagi Penulis merupakan sarana untuk penambahan wawasan dan keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian.
- Bagi peneliti selanjutnya merupakan sarana referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan karya tulis ilmiah dengan topik bahasan yang relevan dengan penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkup provinsi tepatnya di 5 provinsi termiskin yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Penulis melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu dengan menggali informasi melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2024/2025, dimulai sejak bulan Oktober 2024 dengan pengajuan judul kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun matriks jadwal penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Matriks Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024												Tahun 2025															
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan Proposal Skripsi																												
3	Seminar Proposal Skripsi																												
4	Revisi Proposal Skripsi																												
5	Penyusunan Naskah Skripsi																												
6	Ujian skripsi, Revisi Skripsi dan pengesahan skripsi																												